

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Perempuan Dalam Pengelolaan Ikan Di Pesisir Paciran Lamongan

Rudy Hermawan¹⁾, Aris Sunarya²⁾, Sri Roekminiati³⁾, Sapto Pramono⁴⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Rudy.Hermawan@gmail.com, *Aris.sunarya@unitomo.ac.id,

sri.roekminiati@unitomo.ac.id, Sapto.pramono@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemberdayaan nelayan perempuan di Pesisir Paciran, Lamongan, yang menghadapi berbagai hambatan dalam pengelolaan ikan, seperti keterbatasan akses teknologi, modal, pelatihan, serta ketergantungan pada pihak ketiga dalam pengolahan dan pemasaran. Pemberdayaan masyarakat adalah komponen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup komunitas. Namun, hambatan-hambatan tersebut menghalangi peningkatan kualitas produk, perluasan pasar, dan kemandirian ekonomi nelayan perempuan. Mengacu pada pentingnya peran nelayan perempuan dalam ekonomi keluarga, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasinya, serta meningkatkan efektivitas program pemberdayaan yang telah berjalan. Metode kualitatif dengan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Informan utama meliputi nelayan perempuan, anggota komunitas lokal, serta perwakilan lembaga pemerintah dan LSM yang terlibat. Data dianalisis tematik untuk memahami pola, tantangan, dan peluang dalam pemberdayaan nelayan perempuan. Pendekatan ini membantu mengevaluasi sejauh mana program pemberdayaan yang ada telah memberikan dampak positif. Hasil penelitian menunjukkan adanya keberhasilan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan perempuan. Namun, tantangan signifikan seperti keterbatasan teknologi, pelatihan, modal, dan ketergantungan pada pihak ketiga masih menghalangi pencapaian kemandirian ekonomi. Kesimpulannya, meskipun program pemberdayaan telah membawa perubahan positif, diperlukan peningkatan dalam implementasi dan dukungan yang lebih terfokus.

Kata Kunci: Pemberdayaan Nelayan Perempuan; Kemandirian Ekonomi; Pengelolaan Ikan

Abstract

This research discusses the empowerment of female fishers in Pesisir Paciran, Lamongan, who face various obstacles in fish management, such as limited access to technology, capital, training, and dependence on third parties for processing and marketing. Community empowerment is a crucial component in achieving economic independence and improving the quality of life within the community. However, these challenges hinder the enhancement of product quality, market expansion, and the economic independence of female fishers. Given the vital role of female fishers in family economics, this research aims to identify the existing barriers and provide strategic recommendations to overcome them, as well as improve the effectiveness of ongoing empowerment programs. The qualitative method was employed through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Key informants include female fishers, local community members, and representatives from government agencies and NGOs involved. The data was analyzed thematically to understand patterns, challenges, and opportunities in empowering female fishers. This approach helps evaluate the extent to which existing empowerment programs have had a positive impact. The findings show some success in enhancing the knowledge and skills of female fishers. However, significant challenges such as limited access to technology, training, capital, and dependence on third parties still hinder economic independence. In conclusion, although the empowerment programs have brought positive changes, improvements in implementation and more focused support are needed.

Keywords: *Empowerment of Female Fishers; Economic Independence; Fish Management*

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Faradila & Hakim, 2023). Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada secara mandiri, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal yang terancam oleh modernisasi (Alfiyah & Karomah, 2022).

Paciran Kabupaten Lamongan merupakan salah satu contoh dari inisiatif lokal yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat nelayan perempuan sekaligus mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Nelayan perempuan di Paciran memiliki

peran penting dalam sektor perikanan, mulai dari penangkapan ikan hingga pengelolaan hasil tangkapan. Meskipun memiliki potensi besar, komunitas nelayan perempuan di Paciran menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan dan keberlanjutannya. Tantangan ini termasuk infrastruktur yang tidak memadai, akses pasar yang terbatas, modal usaha yang kurang, serta dukungan teknis yang minim. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara potensi ekonomi yang dimiliki oleh komunitas nelayan perempuan di Paciran dengan dukungan yang diterima dari pemerintah maupun sektor swasta.

Berbagai penelitian terkait telah menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal dan pelestarian budaya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2020) menyoroti peran penting pemerintah sebagai fasilitator dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi kreatif. Selain itu, studi oleh (Widharetno Mursalim & Mustika Ramdani, 2019) menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan komunitas, yang relevan dengan kondisi di desa pesisir Paciran yang didominasi oleh nelayan perempuan. Penelitian lain oleh (Bagas dkk., 2024) juga menemukan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat nelayan di desa-desa pesisir berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat setempat.

Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan dalam literatur yang secara khusus membahas bagaimana program pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam konteks komunitas nelayan perempuan di daerah pesisir. Sebagian besar penelitian pemberdayaan masyarakat di Indonesia cenderung berfokus pada daerah pedesaan, di mana tantangan dan dinamika sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat cenderung berbeda dari yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Konteks pesisir membawa dinamika yang lebih kompleks, termasuk adanya persaingan yang lebih ketat, kebutuhan akan inovasi yang lebih tinggi, serta adanya tekanan dari proses modernisasi yang lebih intensif

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan melakukan analisis mendalam tentang strategi pemberdayaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan di komunitas nelayan perempuan di pesisir Paciran. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri, dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan nelayan perempuan di Paciran. Penegasan topik penelitian ini diharapkan dapat membantu memperjelas tujuan dari penelitian ini, yaitu mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi tetapi juga pada pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan.

Topik penelitian ini sangat relevan dan mendesak untuk dibahas, mengingat pentingnya melestarikan sumber daya perikanan di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Globalisasi membawa tantangan tersendiri bagi komunitas nelayan perempuan seperti di Paciran, terutama dalam hal persaingan dengan produk-produk perikanan modern yang diproduksi secara massal. Di sisi lain, globalisasi juga memberikan peluang baru bagi komunitas nelayan perempuan, terutama dalam hal akses ke pasar internasional dan teknologi yang lebih canggih. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat nelayan perempuan di Paciran untuk dapat mengadopsi strategi-strategi yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan peluang yang ada, sambil tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas mereka.

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional untuk merancang program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori pemberdayaan masyarakat tetapi juga memberikan dampak praktis yang nyata bagi komunitas nelayan perempuan di Paciran dan sekitarnya. Pada tahap ini, penting untuk menggarisbawahi bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang memberikan pelatihan atau bantuan keuangan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung di mana masyarakat dapat berkembang dengan memanfaatkan potensi mereka sendiri. Dalam konteks komunitas nelayan perempuan di Paciran, hal ini berarti memberikan akses kepada sumber daya yang diperlukan, baik itu dalam bentuk pengetahuan, teknologi, maupun jaringan pemasaran. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat sebagian besar nelayan perempuan di Paciran memiliki peran ganda sebagai nelayan dan ibu rumah tangga. Oleh karena itu, program pemberdayaan yang dirancang harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dari masyarakat tersebut dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pemberdayaan masyarakat harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan, bukan hanya sebagai program jangka pendek (Maulana dkk., 2019). Keberlanjutan dari program pemberdayaan sangat bergantung pada seberapa baik program tersebut diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan seberapa besar dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan sektor swasta. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang dan mandiri, bahkan setelah program pemberdayaan formal berakhir. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hal ini dapat dicapai melalui analisis mendalam tentang dinamika sosial-ekonomi di Paciran serta peran berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan program pemberdayaan ini.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa topik pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan di pesisir Paciran bukan hanya relevan dalam konteks lokal tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan adalah bagian penting dari identitas nasional Indonesia, dan melestarikannya adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan menjadi landasan bagi upaya-upaya lebih lanjut untuk memformulasikan strategi pemberdayaan yang lebih komprehensif dan adaptif, yang tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga melestarikan sumber daya perikanan yang berharga. Melalui penelitian ini, diharapkan komunitas nelayan perempuan di Paciran dapat menjadi model bagi komunitas-komunitas lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa, serta menjadi contoh bagi komunitas internasional tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teoritis dalam sebuah penelitian adalah dasar yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Pada bagian ini, berbagai teori, konsep, dan kerangka kerja yang relevan dengan topik penelitian akan dibahas untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan isu yang diangkat. Dalam penelitian ini, landasan teoritis akan mencakup beberapa aspek utama, yaitu teori pemberdayaan masyarakat, konsep keberlanjutan, dan peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat nelayan perempuan di pesisir Paciran, Lamongan.

2.1 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Proses meningkatkan kemampuan individu dan komunitas untuk mengendalikan dan mengelola berbagai aspek kehidupan mereka secara mandiri adalah inti dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses yang memungkinkan orang untuk membuat keputusan strategis dalam kehidupan mereka, yang sebelumnya tidak mereka lakukan. Peningkatan kesadaran, pengembangan keterampilan, ketersediaan sumber daya, dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan adalah semua komponen pemberdayaan (Katili dkk., 2022). Teori pemberdayaan banyak diterapkan dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, dengan penekanan khusus pada perempuan, minoritas, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai kelompok terpinggirkan.

Teori ini menekankan pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan dan mengubah pilihan tersebut menjadi tindakan dan hasil yang mereka

inginkan. Menurut (Ariski & Ratnasari, 2022) Konsep pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) muncul sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan (*development*) yang pernah digunakan di Indonesia (di masa orde baru) dan negara-negara berkembang Asia lainnya. Teori pemberdayaan masyarakat memiliki banyak model pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan sebagai acuan adalah teori ABCD (*Asset Based Community Development*).

Teori ini memiliki pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan pemanfaatan aset-aset lokal untuk memberdayakan komunitas (Hartati dkk., 2021). Pendekatan ini berbeda dari model pembangunan yang berfokus pada kebutuhan dan kekurangan, dengan menekankan pada potensi dan sumber daya yang sudah ada dalam komunitas. Menurut teori ABCD, setiap komunitas memiliki berbagai aset yang dapat dioptimalkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk aset individu, aset kelembagaan, aset fisik, aset sumber daya alam, dan aset budaya.

Pendekatan ABCD melihat masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan sebagai kelompok yang mampu mengatasi berbagai masalah, termasuk peningkatan taraf hidup (sosioekonomi). Sebaliknya, mereka dianggap sebagai kelompok yang kuat dan memiliki potensi. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Pendekatan melalui Teori ABCD berusaha mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya lain yang dimiliki oleh anggota komunitas, serta menjalin kemitraan antara berbagai pihak untuk mengembangkan dan memanfaatkan aset-aset ini. Pendekatan ini melibatkan proses partisipatif di mana anggota komunitas secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi aset-aset mereka, merancang proyek pengembangan, dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menekankan pada apa yang dimiliki daripada apa yang kurang, ABCD menciptakan rasa percaya diri, memperkuat jaringan sosial, dan mendorong inisiatif lokal yang dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan.

Pendekatan ABCD juga sangat relevan dalam pemberdayaan nelayan perempuan di Pesisir Paciran, Lamongan, sebagaimana yang dianalisis dalam penelitian ini. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh nelayan perempuan, seperti pengetahuan tradisional dalam pengelolaan dan pengolahan ikan, serta keterampilan manajemen usaha perikanan, program pemberdayaan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas mereka. Melalui pendekatan ABCD, nelayan perempuan dapat diberdayakan untuk berkontribusi secara signifikan pada pembangunan lokal, menciptakan peluang usaha baru, serta memperkuat solidaritas komunitas pesisir.

Misalnya, nelayan perempuan di Pesisir Paciran dapat diberdayakan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang memanfaatkan pengetahuan mereka tentang pengelolaan ikan, baik dalam hal penangkapan maupun pengolahan produk ikan. Program pemberdayaan ini dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola

usaha perikanan secara lebih efisien, sehingga pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga meningkat. Selain itu, nelayan perempuan dapat saling mendukung dalam pemasaran produk, akses ke pasar yang lebih luas, dan pengembangan bisnis dengan memperkuat jejaring sosial dan membentuk kelompok usaha bersama atau koperasi.

Pendekatan ABCD memungkinkan nelayan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan proyek pemberdayaan, yang memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Oleh karena itu, teori ABCD membantu Pesisir Paciran, Lamongan dalam dua hal: meningkatkan perekonomian lokal dan memperkuat rasa kebersamaan serta identitas komunitas pesisir. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemberdayaan tidak hanya dilihat sebagai upaya meningkatkan akses terhadap sumber daya eksternal, tetapi juga sebagai penguatan potensi internal yang sudah ada, sehingga komunitas nelayan perempuan dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam Penelitiannya (Widjajanti, 2011) menjelaskan bahwa di dalam teori pemberdayaan masyarakat terdapat teori pendekatannya yaitu Teori ABCD (*Asset based Community Development*), di dalam teori pendekatan ABCD ini juga terdapat 4 komponen yang perlu diketahui, yaitu (*Problem Based Approach*), (*Need Based Approach*), (*Right Based Approach*), dan (*Asset Based Approach*). 4 Komponen tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- a. *Problem Based Approach*, diartikan sebagai identifikasi dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh komunitas. Dalam pendekatan ini, proses pembangunan dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau tantangan yang menghambat perkembangan komunitas. Meskipun efektif dalam menyelesaikan isu-isu spesifik, pendekatan ini sering kali menekankan pada kelemahan dan kekurangan yang ada dalam komunitas, yang dapat menyebabkan pandangan negatif terhadap kemampuan komunitas itu sendiri.
- b. *Need Based Approach*, Komponen ini menekankan pada identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dalam komunitas. Pendekatan ini berusaha untuk memahami apa yang diperlukan oleh komunitas untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan kemudian merancang intervensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun penting untuk mengenali kebutuhan, pendekatan ini cenderung melihat komunitas dari perspektif kekurangan dan seringkali mengandalkan bantuan eksternal untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi.
- c. *Right Based Approach*, komponen berbasis hak ini menekankan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar individu dalam komunitas. Fokusnya adalah memastikan bahwa setiap anggota komunitas memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan

yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan ini berupaya untuk memperkuat komunitas melalui advokasi hak asasi manusia dan kebijakan yang adil.

- d. *Asset Based Approach*, Komponen ini sebagai inti dari teori ABCD, berfokus pada identifikasi dan pemanfaatan aset-aset yang ada dalam komunitas, seperti keterampilan individu, institusi lokal, dan sumber daya alam. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas dengan mengoptimalkan potensi dan kekuatan yang sudah ada, daripada berfokus pada kekurangan dan kebutuhan. Dengan mengidentifikasi dan memobilisasi aset-aset ini, komunitas dapat mengembangkan solusi yang berkelanjutan dan mandiri untuk tantangan yang dihadapi.

2.2 Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Perempuan

Masyarakat nelayan perempuan di Pesisir Paciran, Lamongan, telah lama menjalani kehidupan yang erat kaitannya dengan aktivitas perikanan. Sebagai bagian dari komunitas pesisir, nelayan perempuan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, kondisi sosial dan ekonomi mereka sebelum adanya program pemberdayaan menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Sebagian besar nelayan perempuan di daerah ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya, baik dalam hal modal, teknologi, maupun informasi. Keadaan ini menyebabkan mereka memiliki posisi yang rentan dalam struktur sosial dan ekonomi, dengan pendapatan yang tidak menentu dan tergantung pada hasil tangkapan suami atau keluarga mereka.

Secara tradisional, nelayan perempuan di Pesisir Paciran berperan dalam pengelolaan ikan yang ditangkap oleh suami atau kerabat mereka. Pekerjaan mereka meliputi proses pembersihan, pengolahan, dan pengeringan ikan, yang kemudian dijual di pasar lokal atau digunakan untuk konsumsi keluarga. Meskipun pekerjaan ini membutuhkan keahlian khusus dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi keluarga, peran mereka seringkali kurang dihargai dan tidak terlihat dalam statistik formal. Posisi mereka dalam komunitas cenderung berada di balik layar, dengan keterbatasan akses terhadap keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan atau distribusi hasil tangkapan.

Kondisi sosial ekonomi ini menciptakan situasi di mana nelayan perempuan di Pesisir Paciran memiliki peran yang krusial namun tidak diakui secara memadai. Keterbatasan ini diperburuk oleh minimnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha perikanan secara lebih efektif. Selain itu, kurangnya akses terhadap modal dan teknologi modern membuat mereka sulit untuk mengembangkan usaha mereka sendiri, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Ketergantungan pada

metode tradisional dan kurangnya diversifikasi sumber pendapatan juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan taraf hidup mereka.

Pada penelitian (Rahmawati & Karmeli, 2022) Peran nelayan perempuan dalam ekonomi keluarga dan komunitas, meskipun terbatas, sangat vital. Mereka tidak hanya berkontribusi melalui pekerjaan fisik yang mereka lakukan, tetapi juga dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga dengan mengelola keuangan rumah tangga dan memastikan kecukupan pangan. Dalam banyak kasus, mereka juga terlibat dalam aktivitas perdagangan kecil-kecilan, seperti menjual hasil olahan ikan atau produk-produk lain di pasar lokal. Meskipun demikian, kontribusi ini seringkali tidak mendapatkan pengakuan yang layak baik di dalam keluarga maupun di komunitas yang lebih luas.

Dengan latar belakang tersebut, sebelum adanya program pemberdayaan, nelayan perempuan di Pesisir Paciran hidup dalam situasi yang serba terbatas. Mereka menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka, dengan sedikit dukungan atau kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang lebih baik. Kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil tangkapan laut dan harga pasar yang fluktuatif, yang membuat pendapatan mereka tidak stabil dan sulit diprediksi. Selain itu, struktur sosial yang patriarkal cenderung membatasi ruang gerak mereka dalam mengambil keputusan strategis yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan komunitas.

Namun, di balik keterbatasan ini, terdapat potensi besar yang belum tergali sepenuhnya. Pengetahuan tradisional yang dimiliki nelayan perempuan tentang pengelolaan ikan dan keterampilan mereka dalam menjalankan usaha kecil-kecilan merupakan aset yang berharga. Dengan adanya intervensi yang tepat, potensi ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. Pemberdayaan yang berfokus pada penguatan kapasitas, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan perempuan di Pesisir Paciran.

Sebelum adanya program pemberdayaan, nelayan perempuan di Pesisir Paciran berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dengan banyak tantangan yang menghambat mereka untuk mengembangkan diri. Meskipun demikian, peran mereka tetap penting dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga dan komunitas. Dengan latar belakang ini, intervensi melalui program pemberdayaan menjadi sangat penting untuk membuka peluang bagi mereka agar dapat berkontribusi lebih besar dalam ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta komunitas pesisir.

2.3 Peran Pemerintah dan Lembaga Lokal dalam Pemberdayaan

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemberdayaan nelayan perempuan di Pesisir Paciran, Lamongan. Melalui kebijakan dan

program-program yang tepat, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan potensi nelayan perempuan. Pemerintah daerah, terutama melalui dinas perikanan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nelayan perempuan memiliki akses yang memadai terhadap berbagai sumber daya seperti pelatihan, teknologi, dan modal. Dukungan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha perikanan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dinas perikanan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam pemberdayaan nelayan perempuan. Dinas ini dapat menyediakan pelatihan teknis dan manajerial yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan nelayan perempuan dalam pengelolaan perikanan. Selain itu, dinas perikanan juga dapat memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas, baik melalui jaringan distribusi maupun melalui pengembangan produk olahan yang memiliki nilai tambah. Dengan bantuan dari dinas perikanan, nelayan perempuan dapat lebih mandiri dalam menjalankan usaha mereka, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan komunitas.

Selain peran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berkontribusi signifikan dalam proses pemberdayaan nelayan perempuan. LSM sering kali menjadi jembatan antara pemerintah dan komunitas lokal, menyediakan dukungan tambahan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan akses ke sumber daya eksternal. LSM yang berfokus pada pemberdayaan perempuan biasanya memiliki program yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas nelayan perempuan, seperti program literasi keuangan, pengembangan usaha kecil, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kolaborasi antara LSM dan pemerintah dapat menghasilkan dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan nelayan perempuan di Pesisir Paciran.

Kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi proses pemberdayaan di sektor perikanan. Kebijakan yang mendukung akses yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor perikanan dapat mempercepat proses pemberdayaan. Misalnya, kebijakan yang memberikan akses prioritas kepada perempuan dalam program bantuan permodalan atau kebijakan yang mendukung pembentukan koperasi nelayan perempuan. Regulasi yang mengatur tata kelola sumber daya perikanan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan dan peran perempuan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir, sehingga mereka dapat terus berkontribusi tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam.

Sinergi antara pemerintah daerah, dinas perikanan, LSM, lembaga pendidikan, dan komunitas nelayan perempuan itu sendiri sangat penting untuk keberhasilan pemberdayaan. Pemerintah daerah dan dinas perikanan harus berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara berbagai pihak, sementara LSM dan lembaga pendidikan dapat memberikan dukungan yang lebih langsung kepada nelayan perempuan (Trivianti dkk.,

2022). Dengan adanya kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, proses pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif, menghasilkan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan perempuan dan keberlanjutan sektor perikanan di Pesisir Paciran, Lamongan.

2.4 Program Pemberdayaan

Berbagai program pemberdayaan telah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan perempuan di Pesisir Paciran, Lamongan, terutama dalam pengelolaan ikan. Program-program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan, fasilitas, dan dukungan yang diperlukan agar nelayan perempuan dapat mengoptimalkan potensi mereka dalam sektor perikanan. Berikut adalah penjelasan tentang program-program tersebut dan peran berbagai pihak dalam implementasinya:

- a. Koperasi Serba Usaha Sentra Perikanan: Koperasi Serba Usaha Sentra Perikanan merupakan salah satu inisiatif utama dalam pemberdayaan nelayan perempuan di daerah ini. Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengadaan barang-barang kebutuhan pengolahan ikan kering, seperti garam, minyak tanah, plastik, fish box, dan peralatan pendukung lainnya. Koperasi ini memiliki sistem kredit yang memungkinkan anggota untuk meminjam barang yang diperlukan dan membayar kembali setelah hasil olahan ikan terjual. Selain itu, koperasi juga mendapatkan pendapatan dari sewa mobil hibah yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tarif sewa Rp600.000 per bulan. Setiap anggota koperasi diwajibkan membayar simpanan sebesar Rp20.000 per bulan. Melalui koperasi ini, nelayan perempuan dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap bahan baku dan peralatan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan hasil dari usaha perikanan mereka.
- b. Pelatihan dan Praktek Diversifikasi Produk Olahan Perikanan: Program pelatihan dan praktek diversifikasi produk olahan perikanan merupakan upaya penting untuk meningkatkan keterampilan nelayan perempuan dalam mengelola produk ikan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga, termasuk penyuluh perikanan dari Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, serta perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat. Program ini menyediakan fasilitas seperti gedung pelatihan dan peralatan yang diperlukan untuk praktik langsung. Diversifikasi produk olahan ikan membantu nelayan perempuan untuk mengembangkan berbagai produk baru dari ikan, seperti kerupuk ikan, abon ikan, dan produk olahan lainnya yang memiliki nilai tambah. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar untuk produk mereka.
- c. Penyuluhan dan Pembinaan dalam Pengelolaan Usaha: Selain koperasi dan pelatihan, program penyuluhan dan pembinaan juga merupakan bagian integral dari

pemberdayaan nelayan perempuan. Penyuluhan dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dengan tujuan memberikan informasi dan bimbingan mengenai teknik pengelolaan usaha yang efisien. Program ini mencakup aspek-aspek seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya alam. Penyuluhan ini membantu nelayan perempuan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik dan menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam proses produksi dan pemasaran ikan.

- d. **Penyediaan Fasilitas Pengolahan dan Penyimpanan:** Fasilitas pengolahan dan penyimpanan yang memadai merupakan elemen penting dalam program pemberdayaan. Pemerintah daerah dan LSM berkolaborasi dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pengolahan ikan, seperti ruang pengolahan yang bersih dan peralatan modern. Fasilitas penyimpanan yang memadai juga disediakan untuk menjaga kualitas produk ikan. Dengan fasilitas yang lebih baik, nelayan perempuan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperpanjang umur simpan produk olahan mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan.
- e. **Program Dukungan Modal Usaha:** Program dukungan modal usaha merupakan salah satu cara untuk membantu nelayan perempuan dalam memulai atau mengembangkan usaha perikanan mereka. Program ini sering kali disediakan oleh pemerintah daerah dan lembaga keuangan mikro, yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah atau tanpa bunga. Dukungan modal ini memungkinkan nelayan perempuan untuk membeli peralatan baru, memperluas kapasitas produksi, atau memulai usaha baru di sektor perikanan. Dengan akses ke modal, mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka, serta memperluas pasar mereka.

Kombinasi dari program-program ini, yang melibatkan koperasi, pelatihan, penyuluhan, penyediaan fasilitas, dukungan modal, dan partisipasi masyarakat lokal, membentuk landasan yang kuat untuk pemberdayaan nelayan perempuan di Pesisir Paciran. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan nelayan perempuan dapat meningkatkan kapasitas mereka, memperbaiki kesejahteraan ekonomi mereka, dan berkontribusi lebih besar terhadap perkembangan komunitas pesisir.

2.4 Pengelolaan Ikan oleh Nelayan Perempuan

Pengelolaan ikan oleh nelayan perempuan merupakan kegiatan yang penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial komunitas pesisir. Di banyak negara berkembang, perempuan memainkan peran kunci dalam kegiatan pasca panen, yang mencakup pembersihan, penggaraman, pengeringan, serta pemasaran ikan. Pekerjaan ini

sering kali dilakukan dalam lingkungan yang menantang dengan sumber daya yang terbatas. Dalam banyak kasus, para perempuan ini mengembangkan teknik dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk ikan mereka, meskipun sering kali tanpa dukungan teknologi modern.

Nelayan perempuan biasanya terlibat dalam pengolahan ikan dengan metode tradisional seperti pengeringan dan penggaraman. Proses pengeringan ikan biasanya dilakukan dengan menjemur ikan di bawah sinar matahari, yang memerlukan penanganan yang hati-hati agar ikan tidak terkontaminasi oleh debu atau serangga. Penggaraman, di sisi lain, melibatkan merendam ikan dalam larutan garam untuk meningkatkan daya tahan dan rasa ikan. Kedua metode ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan setiap komunitas bisa memiliki cara unik dalam menjalankan proses ini.

Selain metode tradisional, beberapa komunitas nelayan perempuan telah mulai mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ikan olahan mereka. Misalnya, penggunaan oven *FTT-Thiaroye* yang dikembangkan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* telah membantu para perempuan di *Côte d'Ivoire* dan negara-negara lain untuk meningkatkan efisiensi pengasapan ikan. Oven ini tidak hanya mengurangi jumlah kayu bakar yang diperlukan, tetapi juga mengurangi emisi asap, sehingga lebih ramah lingkungan dan lebih sehat bagi para pekerja.



Gambar 1 Kegiatan Pengasapan ikan

Pekerjaan pengolahan ikan oleh nelayan perempuan tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Para perempuan ini sering kali menjadi tulang punggung keluarga mereka, menggunakan pendapatan dari pengolahan ikan untuk mendukung pendidikan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, keterlibatan mereka dalam komunitas pengolahan ikan memberikan kesempatan untuk membangun jaringan sosial dan saling mendukung, yang esensial dalam masyarakat pesisir yang sering kali terisolasi,

Namun, tantangan tetap ada. Para nelayan perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses modal, teknologi, dan pasar yang lebih luas. Di banyak tempat, mereka juga harus berhadapan dengan diskriminasi gender yang membatasi peluang mereka untuk berkembang. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan nelayan perempuan, termasuk pelatihan teknis, akses ke pembiayaan, dan pengembangan infrastruktur yang memadai.

3. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan dalam pengelolaan ikan di Pesisir Paciran, Lamongan. Metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh informasi mengenai dinamika pemberdayaan dan pengelolaan ikan oleh nelayan perempuan. Bagian ini mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, dan fokus penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan praktik para nelayan perempuan di Pesisir Paciran, Lamongan, dalam pengelolaan ikan. Pendekatan kualitatif sangat cocok untuk mengkaji konteks sosial dan budaya yang kompleks serta untuk mengungkap dinamika pemberdayaan yang mungkin tidak terlihat melalui metode kuantitatif.

Penelitian kualitatif mengandalkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang kaya dan detail mengenai pengalaman pribadi, tantangan, dan strategi yang digunakan oleh nelayan perempuan dalam pengelolaan ikan. Observasi partisipatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melihat langsung praktik-praktik pengelolaan ikan dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Sementara itu, analisis dokumen membantu peneliti untuk memahami kebijakan lokal dan program pemberdayaan yang telah diterapkan di daerah tersebut.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data numerik tetapi juga pada pemahaman konteks dan makna di balik data tersebut. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, di mana peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan kategori dari data yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori yang berakar pada realitas sosial yang diamati. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan memperkuat pemberdayaan nelayan perempuan dalam pengelolaan ikan di Pesisir Paciran, Lamongan.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan dalam pengelolaan ikan di Pesisir Paciran, Lamongan. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana nelayan perempuan memainkan peran penting dalam kegiatan pengelolaan ikan, termasuk pembersihan, penggaraman, pengeringan, dan pemasaran ikan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh nelayan perempuan dalam kegiatan pengelolaan ikan dan bagaimana mereka mengatasi tantangan tersebut melalui inovasi dan strategi adaptif.

Penelitian ini juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari keterlibatan nelayan perempuan dalam pengelolaan ikan. Fokus ini mencakup analisis bagaimana kontribusi mereka terhadap ekonomi rumah tangga dan komunitas pesisir, serta dampak terhadap kesejahteraan keluarga, pendidikan anak-anak, dan pembangunan komunitas secara keseluruhan. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai peran sosial nelayan perempuan, termasuk bagaimana mereka membangun jaringan sosial dan mendukung satu sama lain dalam komunitas pengelolaan ikan.

Selain itu, penelitian ini akan mengkaji kebijakan dan program pemberdayaan yang telah diterapkan di Pesisir Paciran, Lamongan, serta efektivitasnya dalam mendukung nelayan perempuan. Fokus ini mencakup analisis terhadap akses nelayan perempuan terhadap sumber daya, pelatihan, teknologi, dan pasar. Penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program tersebut berhasil mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh nelayan perempuan dan meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan ikan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nelayan perempuan.

Lokasi penelitian ini adalah Pesisir Paciran, yang terletak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Paciran dikenal sebagai salah satu daerah pesisir dengan aktivitas perikanan yang cukup tinggi dan menjadi pusat bagi banyak komunitas nelayan. Daerah ini dipilih karena memiliki populasi nelayan perempuan yang signifikan yang terlibat dalam berbagai tahapan pengelolaan ikan. Pesisir Paciran menawarkan konteks yang relevan dan kaya untuk mengkaji dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh aktivitas pengelolaan ikan oleh nelayan perempuan. Penelitian di lokasi ini akan memberikan informasi mengenai praktik pengelolaan ikan, tantangan yang dihadapi, serta upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh dan untuk nelayan perempuan di kawasan pesisir.

4. PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan secara rinci hasil penelitian yang dilakukan di Pesisir Paciran, Lamongan, serta analisis menyeluruh terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan nelayan perempuan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap keberlanjutan pengelolaan ikan di wilayah tersebut.

4.1 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan perempuan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan di Pesisir Paciran, Lamongan merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas pesisir. Proses pemberdayaan ini menggunakan pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*) yang berfokus pada identifikasi dan pemanfaatan aset-aset lokal untuk memberdayakan komunitas. Pendekatan ini melibatkan beberapa fungsi utama: sebagai fasilitator, yang membantu nelayan perempuan mengidentifikasi dan memanfaatkan aset-aset mereka; sebagai regulator, yang memastikan ketersediaan sumber daya dan kebijakan yang mendukung; dan sebagai katalisator, yang mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antar anggota komunitas untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

A. *Problem Based Approach*

Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan di Pesisir Paciran melalui pendekatan berbasis masalah (*Problem Based Approach*). Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh nelayan perempuan dalam pengelolaan ikan, seperti kurangnya pengetahuan tentang teknik pengolahan ikan yang lebih efisien dan keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas. Pemerintah kemudian menyelenggarakan berbagai pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengolah ikan serta memahami cara memasarkan produk secara lebih efektif.

Selain pelatihan, pemerintah juga memberikan bantuan berupa alat-alat pengolahan ikan yang lebih modern, seperti mesin pengering ikan dan alat pengemas vakum. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan memperpanjang umur simpan ikan, sehingga nelayan perempuan dapat menjual ikan olahan dengan harga yang lebih tinggi di pasar. Namun, hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa meskipun pendekatan berbasis masalah ini efektif dalam mengatasi beberapa tantangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa nelayan perempuan menyatakan bahwa bantuan alat yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau sulit dioperasikan tanpa adanya pelatihan lanjutan.

Keterbatasan anggaran dan tantangan dalam adaptasi teknologi menunjukkan bahwa meskipun pendekatan berbasis masalah dapat memberikan solusi yang nyata,

masih diperlukan dukungan yang lebih berkelanjutan dan terfokus untuk memastikan bahwa pemberdayaan nelayan perempuan ini benar-benar efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini perlu terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik komunitas untuk menghindari pandangan negatif terhadap kemampuan mereka sendiri.

B. *Need Based Approach*

Dalam pendekatan *Need Based Approach* dalam teori *Asset Based Community Development* (ABCD), fokus utamanya adalah pada identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dalam suatu komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh komunitas agar dapat mencapai kondisi yang lebih baik dan sejahtera. Setelah kebutuhan tersebut teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang intervensi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun pendekatan ini penting karena memungkinkan komunitas untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan yang diperlukan, namun ia cenderung memandang komunitas dari perspektif kekurangan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketergantungan pada bantuan eksternal.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan di Pesisir Paciran Lamongan, *Need Based Approach* dapat diterapkan dengan mengidentifikasi kebutuhan spesifik yang dihadapi oleh kelompok nelayan perempuan dalam pengelolaan ikan. Misalnya, Nelayan perempuan memerlukan pelatihan dalam teknik pengolahan ikan yang lebih efisien atau akses ke pasar yang lebih luas untuk menjual produk mereka. Dengan memahami kebutuhan ini, program pemberdayaan dapat dirancang untuk memberikan pelatihan yang relevan, menyediakan akses ke teknologi pengolahan yang lebih baik, atau menghubungkan mereka dengan jaringan distribusi yang lebih efektif. Namun, tantangan dari pendekatan ini adalah risiko mengabaikan potensi dan sumber daya lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh nelayan perempuan tersebut.

Sebagai contoh, jika pendekatan ini terlalu bergantung pada identifikasi kebutuhan tanpa mempertimbangkan potensi lokal, komunitas nelayan perempuan mungkin lebih cenderung menunggu bantuan daripada memanfaatkan keterampilan yang sudah mereka miliki. Oleh karena itu, meskipun *Need Based Approach* membantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak, penting untuk mengimbangnya dengan strategi yang juga mengakui dan memanfaatkan aset-aset yang ada dalam komunitas, sehingga pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beroperasi di Lamongan, dapat diketahui bahwa pendekatan *Need Based Approach* menjadi landasan utama dalam upaya pemberdayaan komunitas nelayan perempuan di daerah tersebut. LSM tersebut mengungkapkan bahwa melalui interaksi langsung dengan

para nelayan perempuan, mereka berhasil mengidentifikasi berbagai kebutuhan mendesak yang selama ini belum terpenuhi, seperti kebutuhan akan pelatihan pengelolaan ikan yang lebih efisien, akses terhadap peralatan modern, serta dukungan dalam pemasaran produk. Dengan memahami kebutuhan-kebutuhan ini, LSM dapat merancang program-program yang lebih relevan dan tepat sasaran, sehingga nelayan perempuan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Namun, meskipun *Need Based Approach* telah membantu dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan mendesak, LSM juga menyadari bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan jika hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan. Mereka menekankan pentingnya mendorong komunitas nelayan perempuan untuk mengenali dan memanfaatkan aset yang sudah dimiliki, seperti keterampilan lokal, pengetahuan tradisional, dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Dengan memadukan pendekatan berbasis kebutuhan dengan penguatan aset lokal, program pemberdayaan yang dilakukan diharapkan dapat lebih berkelanjutan dan mampu menciptakan dampak yang lebih besar dalam jangka panjang.

Pendekatan yang berimbang ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan meningkatkan kemandirian komunitas nelayan perempuan. LSM tersebut meyakini bahwa ketika kebutuhan mendesak terpenuhi sambil memanfaatkan potensi lokal, nelayan perempuan akan memiliki lebih banyak peluang untuk berinovasi dan mengembangkan solusi yang relevan dengan konteks lokal mereka. Hasil akhirnya adalah pemberdayaan yang tidak hanya bersifat sementara tetapi juga mengakar kuat dalam komunitas, memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih percaya diri.

C. *Right Based Approach*

Right Based Approach dalam teori *Asset-Based Community Development (ABCD)* merupakan pendekatan yang menekankan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar individu dalam suatu komunitas. Fokus utama dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa setiap anggota komunitas memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, peluang, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan ini berupaya memperkuat komunitas melalui advokasi hak asasi manusia dan kebijakan yang adil, dengan tujuan memastikan bahwa hak-hak setiap individu diakui dan dihormati, tanpa terkecuali.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan di Pesisir Paciran, Lamongan, *Right Based Approach* diimplementasikan dengan memastikan bahwa para perempuan nelayan memiliki hak yang sama dalam akses terhadap sumber daya perikanan dan peluang ekonomi. Pemberdayaan ini juga melibatkan upaya untuk

mengintegrasikan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut dan ikan. Selain itu, memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan, teknologi, dan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka merupakan bagian penting dari pendekatan ini. Dengan demikian, perempuan nelayan tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama yang berhak dalam pengelolaan sumber daya.

Pendekatan berbasis hak ini juga penting dalam mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang mungkin terjadi di komunitas nelayan. Dengan memastikan hak-hak perempuan diakui dan dilindungi, komunitas dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan nelayan di Pesisir Paciran tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan posisi mereka dalam komunitas melalui pengakuan hak-hak dasar mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Aktivistis atau Pengacara Hak Asasi Manusia dan Ibu Karlin, dapat diketahui bahwa pendekatan berbasis hak memiliki peran dalam pemberdayaan nelayan perempuan di Pesisir Paciran. Pengabaian hak-hak dasar, seperti akses terhadap sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, telah menempatkan nelayan perempuan dalam posisi yang rentan dan termarginalkan. Tanpa adanya kebijakan yang mendukung kesetaraan dan inklusivitas, hak-hak mereka sering kali hanya menjadi wacana tanpa realisasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kurangnya perhatian terhadap hak-hak nelayan perempuan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mereka, tetapi juga mempengaruhi keseluruhan dinamika sosial dan ekonomi komunitas nelayan. Ketidakadilan dalam akses dan partisipasi menciptakan kesenjangan yang semakin memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan lokal. Pendekatan berbasis hak bukan hanya soal memberikan kesempatan yang setara, tetapi juga tentang memperbaiki struktur dan sistem yang selama ini mengabaikan kontribusi penting perempuan dalam pengelolaan sumber daya laut.

Dengan menerapkan pendekatan berbasis hak secara efektif, dapat terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan nelayan perempuan di Paciran. Ketika hak-hak mereka diakui dan dilindungi, perempuan nelayan akan lebih diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya dan mengambil peran yang lebih besar dalam keputusan-keputusan penting yang memengaruhi komunitas mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka secara individu, tetapi juga akan membawa dampak positif bagi seluruh komunitas nelayan, menciptakan lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

D. *Asset Based Approach*

Asset Based Approach dalam teori ABCD (*Asset Based Community Development*) berfokus pada pemanfaatan dan pengembangan aset-aset yang dimiliki oleh komunitas sebagai dasar pemberdayaan. Pendekatan ini tidak melihat komunitas dari sudut pandang kekurangan atau masalah, melainkan dari kekuatan dan potensi yang ada, seperti keterampilan individu, jaringan sosial, sumber daya alam, dan institusi lokal. Dengan mengidentifikasi dan memobilisasi aset-aset ini, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Pendekatan ini juga mendorong keterlibatan aktif komunitas dalam setiap proses pengembangan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai.

Asset Based Approach dapat diimplementasikan dengan mengidentifikasi berbagai aset yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Aset ini mungkin berupa pengetahuan tradisional dalam pengolahan ikan, keterampilan dalam pengelolaan sumber daya laut, serta jaringan sosial yang kuat antar perempuan nelayan. Pendekatan ini bisa dimulai dengan memetakan keterampilan dan sumber daya yang dimiliki oleh para perempuan nelayan, seperti kemampuan dalam mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah. Selain itu, kekuatan institusi lokal dan dukungan sosial yang ada juga bisa dimobilisasi untuk mendukung pengembangan usaha pengolahan ikan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Dengan memfokuskan pada apa yang sudah dimiliki oleh komunitas nelayan perempuan di Pesisir Paciran, pendekatan ini dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Para perempuan nelayan dapat diberdayakan melalui pelatihan dan pendampingan yang memanfaatkan pengetahuan lokal serta jaringan sosial yang ada, sehingga mereka mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk olahan ikan. Hasil akhirnya, pemberdayaan ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kemandirian komunitas dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Koperasi Nelayan Paciran dan Ibu Darni, dapat diketahui bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis aset di Pesisir Paciran telah memberikan dampak yang signifikan bagi komunitas nelayan perempuan. Keterampilan tradisional yang dimiliki oleh para perempuan nelayan, terutama dalam hal pengolahan ikan, diakui sebagai aset yang sangat berharga. Koperasi nelayan telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengembangan keterampilan ini, sehingga mampu menjadi usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan dukungan institusi lokal, seperti koperasi, para perempuan nelayan mendapatkan pelatihan yang meningkatkan kapasitas mereka dan akses ke pasar yang lebih luas.

Pendekatan yang berfokus pada aset ini juga telah meningkatkan kemandirian para perempuan nelayan. Melalui pelatihan dan dukungan yang diberikan, mereka kini lebih percaya diri dalam mengelola dan memasarkan hasil tangkapan serta olahan mereka. Kemandirian ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memperkuat posisi perempuan nelayan dalam komunitas, memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah secara lebih efisien, produksi dan kualitas olahan ikan meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan para perempuan nelayan.

Kisah sukses ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan berbasis aset dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya mengakui dan memanfaatkan potensi yang ada dalam komunitas, tetapi juga mendorong pengembangan yang mandiri dan tangguh. Dalam konteks Pesisir Paciran, pendekatan ini telah membantu para perempuan nelayan untuk keluar dari ketergantungan, mengubah aset-aset lokal menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini juga menegaskan bahwa dengan dukungan yang tepat, potensi lokal dapat dioptimalkan untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh komunitas nelayan perempuan.

4.2 Hambatan yang Dihadapi Masyarakat Nelayan Perempuan Dalam Pengelolaan Ikan

Dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan di Pesisir Paciran Lamongan, berbagai hambatan telah diidentifikasi yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan program tersebut. Hambatan-hambatan ini meliputi keterbatasan akses ke teknologi dan pelatihan, kekurangan modal, akses terbatas ke pasar, serta kendala administratif dan perizinan. Identifikasi menyeluruh terhadap hambatan-hambatan ini diperlukan agar strategi yang tepat dapat diterapkan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan hasil dari program pemberdayaan.

A. Keterbatasan Akses ke Teknologi dan Pelatihan

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses ke teknologi dan pelatihan. Banyak masyarakat nelayan perempuan di Pesisir Paciran Lamongan menghadapi kesulitan dalam memperoleh teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pengolahan ikan. Alat-alat pengolahan ikan yang lebih canggih, seperti mesin pengering atau alat pengemas, sering kali tidak tersedia atau terlalu mahal bagi mereka. Tanpa adanya teknologi yang memadai, proses pengolahan ikan tetap dilakukan dengan metode tradisional yang mungkin kurang efisien dan tidak mampu memenuhi standar kualitas pasar yang lebih tinggi.

Selain itu, pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikan teknologi baru juga sering kali terbatas. Program pelatihan yang ada mungkin tidak mencakup semua anggota komunitas atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Keterbatasan dalam akses pelatihan berarti bahwa banyak nelayan perempuan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi secara optimal, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas dan kualitas produk mereka. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan ikan modern dapat menghambat upaya mereka untuk meningkatkan hasil dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Pentingnya pelatihan dan teknologi dalam pengelolaan ikan tidak hanya berhubungan dengan efisiensi produksi, tetapi juga dengan daya saing produk di pasar. Tanpa dukungan teknologi dan pelatihan yang memadai, nelayan perempuan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengolah ikan dengan standar yang dibutuhkan pasar, yang dapat mempengaruhi harga jual dan pemasaran produk mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi yang lebih terfokus, termasuk penyediaan teknologi yang sesuai dan pelatihan yang berkelanjutan agar nelayan perempuan dapat mengoptimalkan potensi mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

B. Kurangnya Modal dan Sumber Daya

Selain keterbatasan akses ke teknologi dan pelatihan, kurangnya modal dan sumber daya juga menjadi hambatan besar bagi masyarakat nelayan perempuan di Pesisir Paciran Lamongan. Modal yang minim membuat mereka kesulitan untuk membeli peralatan pengolahan ikan yang lebih modern atau untuk meningkatkan skala usaha mereka. Tanpa modal yang memadai, banyak nelayan perempuan terpaksa menggunakan metode dan alat-alat tradisional yang kurang efisien dan tidak mampu memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pasar yang lebih luas.

Keterbatasan sumber daya juga berdampak pada kemampuan mereka untuk mengakses bahan baku berkualitas atau untuk mendanai kegiatan pemasaran yang efektif. Sering kali, hasil tangkapan ikan yang mereka olah memiliki nilai jual yang rendah karena keterbatasan ini, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan mereka secara keseluruhan. Ketika nelayan perempuan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan usaha, mereka juga sulit untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan komunitas mereka.

Kurangnya modal dan sumber daya membuat nelayan perempuan menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan pasar. Tanpa cadangan keuangan yang memadai, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dalam situasi sulit, seperti ketika harga ikan turun atau ketika terjadi penurunan hasil tangkapan. Ketergantungan pada pendapatan harian membuat mereka sulit untuk berinvestasi dalam perbaikan jangka panjang, baik dalam hal peralatan maupun strategi bisnis. Untuk mengatasi tantangan ini,

perlu adanya dukungan finansial yang lebih besar, baik melalui program kredit mikro, bantuan modal dari pemerintah, atau inisiatif lain yang dapat membantu nelayan perempuan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

C. Ketergantungan pada Pihak Ketiga

Hambatan lainnya adalah ketergantungan pada pihak ketiga dalam proses pengolahan dan pemasaran ikan. Banyak nelayan perempuan di Pesisir Paciran Lamongan mengandalkan pihak ketiga, seperti tengkulak atau perusahaan pengolahan ikan, untuk menangani aspek-aspek penting dari usaha mereka. Ketergantungan ini sering kali mengakibatkan nelayan perempuan kehilangan kontrol atas harga jual, kualitas produk, dan margin keuntungan yang seharusnya mereka peroleh. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan mereka menjadi tidak stabil dan tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya dari hasil tangkapan mereka.

Selain itu, ketergantungan pada pihak ketiga dapat menghambat inovasi dan pengembangan produk. Nelayan perempuan mungkin tidak memiliki akses langsung ke informasi pasar atau kesempatan untuk mengembangkan produk yang dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil tangkapan mereka. Ketika mereka terikat dengan perantara atau perusahaan tertentu, mereka sering kali terpaksa mengikuti kebijakan dan keputusan pihak ketiga yang mungkin tidak selaras dengan kebutuhan atau keinginan mereka sendiri. Hal ini dapat menghambat kreativitas dan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Ketergantungan pada pihak ketiga menimbulkan risiko tambahan, terutama jika pihak ketiga tersebut tidak dapat memenuhi komitmennya atau mengalami kesulitan keuangan. Jika mitra pengolahan atau pemasaran menghadapi masalah, nelayan perempuan dapat mengalami gangguan dalam pendapatan dan proses produksi mereka. Untuk mengurangi ketergantungan ini, diperlukan inisiatif yang mendukung pembangunan kapasitas dan kemandirian nelayan perempuan, termasuk pelatihan tentang pengelolaan usaha, akses ke pasar langsung, dan dukungan dalam pengembangan usaha mandiri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di Pesisir Paciran, Lamongan, terkait pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan dalam pengelolaan ikan, serta rekomendasi yang diusulkan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan ini memberikan gambaran umum mengenai dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial nelayan perempuan, sementara rekomendasi menawarkan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan

yang dihadapi dan meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan program pemberdayaan tersebut.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan di Pesisir Paciran, Lamongan, memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan pengolahan ikan dan akses ke teknologi, nelayan perempuan kini lebih mampu mengelola usaha mereka dengan lebih mandiri dan efisien. Program ini juga telah memperkuat posisi mereka dalam komunitas, memberikan mereka lebih banyak kontrol atas pengelolaan sumber daya perikanan dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa implementasi program pemberdayaan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan-hambatan utama yang dihadapi termasuk keterbatasan akses ke modal dan sumber daya, serta ketergantungan pada pihak ketiga dalam pemasaran produk. Meskipun telah ada upaya untuk mengatasi masalah ini, banyak nelayan perempuan yang masih bergantung pada metode tradisional dan kurang memiliki akses ke pasar yang lebih luas, yang membatasi potensi penuh dari pemberdayaan ini.

Meskipun demikian, dampak positif yang telah dicapai menunjukkan bahwa program pemberdayaan ini memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kesejahteraan nelayan perempuan dan komunitas mereka. Dengan dukungan yang lebih kuat dan perbaikan dalam implementasi program, keberlanjutan usaha pengolahan ikan di Pesisir Paciran dapat tercapai, memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan ekonomi lokal dan pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan di Pesisir Paciran, Lamongan.:

- A. Untuk mengatasi keterbatasan akses ke teknologi dan pelatihan, perlu adanya penyediaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik nelayan perempuan. Pemerintah daerah atau lembaga terkait dapat memperkenalkan peralatan pengolahan ikan yang lebih efisien dan terjangkau serta menyediakan program pelatihan berkelanjutan. Pelatihan ini sebaiknya tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga mencakup manajemen usaha dan strategi pemasaran agar nelayan perempuan dapat lebih mandiri dalam mengelola usahanya dan meningkatkan daya saing produk mereka.
- B. Terkait masalah kurangnya modal dan sumber daya, penting untuk mengembangkan skema dukungan finansial yang lebih luas dan fleksibel. Ini bisa dilakukan melalui program kredit mikro yang didesain khusus untuk nelayan perempuan, bantuan modal dari pemerintah, atau kemitraan dengan lembaga keuangan dan swasta. Dukungan ini akan membantu mereka mengakses peralatan modern, meningkatkan skala usaha, dan membuka peluang baru untuk pemasaran yang lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka
- C. Untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, diperlukan upaya untuk memberdayakan nelayan perempuan agar dapat mengelola proses pengolahan dan pemasaran ikan secara mandiri. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat membantu dengan menyediakan pelatihan dan akses ke pasar langsung, serta mendukung pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama. Dengan demikian, nelayan perempuan dapat lebih berdaya dalam menentukan harga, meningkatkan kualitas produk, dan memperoleh margin keuntungan yang lebih besar, yang akan berdampak positif pada stabilitas pendapatan dan kesejahteraan mereka.

REFERENSI

- Alfiah, A., & Karomah, W. (2022). Pemberdayaan Nelayan Berbasis Interpreneurship. *Participatory: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 56–75. <https://doi.org/10.58518/Participatory.V1i2.1833>
- Ariski, Y., & Ratnasari, W. P. (2022). Peran Kelembagaan Lokal Dalam Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 10. <https://doi.org/10.37064/Jpm.V10i1.9921>
- Bagas, M. C., Sholikhah, R. A., Faroha, S., & Rahmawati, V. (2024). Implementasi Asset Based Community Development Dalam Menumbuhkan Modal Sosial, Ekonomi Dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Desa Branta. *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 168. <https://doi.org/10.21043/Cdjpmi.V7i2.22509>
- Faradila, D., & Hakim, L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Impikasinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Nilai Tambah Kerupuk Tiram (Studi Kasus Di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8(2), 175–183. www.jim.unsyiah.ac.id/jfp

- Hartati, S., Bayu, K., Mustari, E., & Karim, E. (2021). Pemberdayaan Perempuan Nelayan Melalui Metode Community Based Participatory Action (Studi Kasus Perempuan Nelayan Desa Pangandaran, Jawa Barat). *Sarwahita*, 18(01), 91–105. <https://doi.org/10.21009/Sarwahita.181.9>
- Katili, M. R., Lahay, S. N., & Amali, L. N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Potensi Lokal Desa Untuk Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs). *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(2), 465–477. <https://doi.org/10.37905/Sibermas.V11i2.12214>
- Maulana, M., Sosial, D., & Sleman, K. (2019). Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat Di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. Dalam *Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (Vol. 4, Nomor 2). <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower>
- Rahmawati, F., & Karmeli, E. (2022). Peranan Perempuan Pesisir Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga. *Samalewa*, 2(1), 90–99. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/samalewapp.90-99>
- Sari, R. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal Di Desa Kediri Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu*.
- Trivianti, M., Zulkarnain, Z., & An, D. (2022). Pemberdayaan Nelayan Berbasis Gender Dalam Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Darul Aman, Provinsi Riau. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1), 13. <https://doi.org/10.15578/Marina.V8i1.10351>
- Widharetno Mursalim, S., & Mustika Ramdani, E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Promosi Potensi Desa (Studi Kasus Di Desa Parungserab Kabupaten Bandung)*. 285–304.
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. Dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 12, Nomor 1).